

SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN SAK ETAP DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA KOPERASI PEGAWAI NEGERI BINA MARGA MAKASSAR



**NUR ANNISA
2010323015**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2022**

SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN SAK ETAP DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA KOPERASI PEGAWAI NEGERI BINA MARGA MAKASSAR



Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi

**NUR ANNISA
2010323015**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2022**

SKRIPSI

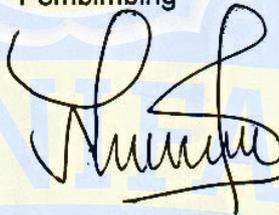
ANALISIS PENERAPAN SAK ETAP DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA KOPERASI PEGAWAI NEGERI BINA MARGA MAKASSAR

disusun dan diajukan oleh

NUR ANNISA
2010323015

telah diperiksa dan telah diuji

Makassar, 28 Maret 2022
Pembimbing



Nurbayani, S.E., M.Si., CTA., ACPA
NIDN: 0926098702

Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Fajar



Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA
NIDN: 0925107801

SKRIPSI

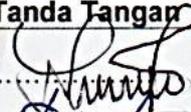
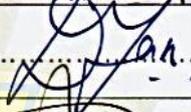
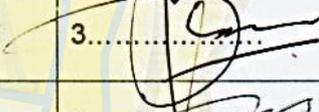
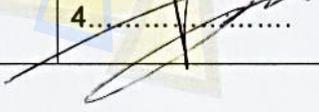
ANALISIS PENERAPAN SAK ETAP DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA KOPERASI PEGAWAI NEGERI BINA MARGA MAKASSAR

disusun dan diajukan oleh

NUR ANNISA
2010323015

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **28 Maret 2022** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Dewan Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Nurbayani. S.E., M.Si., CTA., ACPA NIDN: 0926098702	Ketua	1..... 
2.	Andi Dian Novita, S.ST., M.Si NIDN: 0909118801	Sekretaris	2..... 
3.	Herawati Dahlan S.E, M.Ak NIDN: 0905077106	Anggota	3..... 
4.	Andi Abdul Azis Ishak, SE., M.Com., Ak NIDN: 0006097102	Eksternal	4..... 

Dekan Fakultas Ekonomi
dan Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Fajar



UNIVERSITAS FAJAR
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
Dr. Yusmantzar, S.Sos., M.I.Kom
NIDN: 0925096902

Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Fajar



UNIVERSITAS FAJAR
PRODI AKUNTANSI
Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA
NIDN: 0925107801

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Annisa

NIM : 2010323015

Program Studi : S1 Akuntansi

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul "Analisis Penerapan SAK ETAP dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada Koperasi Pegawai Negeri Bina Marga Makassar" adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 11 Maret 2022

Yang membuat pernyataan,



Nur Annisa

PRAKATA

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan banyak rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Tak lupa shalawat dan salam senantiasa terlimpah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW. Adapun judul skripsi penulis yaitu “Analisis Penerapan SAK ETAP dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada Koperasi Pegawai Negeri Bina Marga Makassar”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program S1 Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Fajar.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan dorongan dari semua pihak, skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih secara khusus kepada kedua orang tua tercinta; Ibunda Hasniah dan Ayahanda Abd. Rasyid, kepada Ibu Nurbayani, S.E., M.Si., CTA., ACPA selaku pembimbing yang selalu memberikan masukan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini, kepada teman-teman terkasih, serta kepada keluarga besar yang saya sayangi, dan kepada berbagai pihak yang selalu memberikan motivasi serta dukungan untuk menyelesaikan tugas skripsi ini. Tak lupa pula ucapan terima kasih penulis tujukan kepada:

1. Bapak Dr. Mulyadi Hamid, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Fajar Makassar;
2. Ibu Dr. Yusmanizar, S.Sos., M.I.Kom., sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Fajar;
3. Ibu Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Fajar.

4. Ibu Yuliana S. selaku pimpinan perusahaan tempat saya bekerja yang senantiasa memberikan izin kepada saya untuk melakukan kegiatan bimbingan pada saat jam kerja;
5. Bapak/Ibu dosen pengajar dan staf Universitas Fajar;
6. Pihak pengurus dan pengelola Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Bina Marga Makassar yang telah bersedia memberikan berbagai data demi kelancaran penyusunan skripsi.
7. Teman-teman kelas Eksekutif Universitas Fajar 2020 yang senantiasa memberikan semangat dan dorongan untuk menyelesaikan penyusunan skripsi.
8. Semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan skripsi.

Semoga segenap bantuan yang ditujukan pada penulis diberkahi oleh Allah SWT dan menjadi amalan-amalan baik yang dibalas dengan kebaikan pula. Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna. Oleh sebab itu, penulisi mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan pada masa mendatang dan guna penyelesaian skripsi, sehingga dapat bermanfaat untuk pembacanya.

UNIVERSITAS FAJAR
Makassar, Maret 2022

Nur Annisa

ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN SAK ETAP DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA KOPERASI PEGAWAI NEGERI BINA MARGA MAKASSAR

**NUR ANNISA
NURBAYANI**

Pedoman penyusunan laporan keuangan UMKM seperti koperasi telah disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK-IAI). Pedoman tersebut dinamakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). SAK ETAP merupakan solusi bagi usaha kecil dan menengah yang mengalami kesulitan dalam menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) saat ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk penyusunan laporan keuangan yang telah dibuat oleh Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Bina Marga Makassar dan untuk mengetahui bentuk penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Bina Marga Makassar. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif berlandaskan studi kasus pada laporan keuangan tahun 2021 Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Bina Marga Makassar. Indikator penilaian sebagai bentuk penerapan SAK ETAP (2016) dalam penelitian ini adalah laporan keuangan dan komponen-komponennya telah sesuai dengan jenis dan komponen laporan keuangan yang diatur dalam SAK ETAP (2016).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan yang dimiliki oleh Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Bina Marga Makassar belum menerapkan standar akuntansi SAK ETAP sebab terdapat pos-pos keuangan yang belum sesuai dengan ketentuan yang diatur. Selain itu, laporan keuangan yang disusun oleh Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Bina Marga Makassar berupa laporan laba rugi, laporan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU), dan laporan neraca saldo. Adapun laporan keuangan yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) adalah laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan neraca, laporan arus kas, dan ctaatan atas laporan keuangan.

Kata Kunci: Laporan Keuangan, SAK ETAP, Koperasi.

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE APPLICATION OF SAK ETAP IN THE PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS AT THE COOPERATIVE OF BINA MARGA MAKASSAR CIVIL SERVANT

**NUR ANNISA
NURBAYANI**

Guidelines for the preparation of financial reports for SMEs such as cooperatives have been prepared by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants (DSAK-IAI). The guidelines are known as Financial Accounting Standards for Entities Without Public Accountability (SAK ETAP). SAK ETAP is a solution for small and medium-sized businesses that have difficulty in applying the current Statement of Financial Accounting Standards (PSAK). The purpose of this study was to determine the form of preparation of financial statements that had been made by the Cooperative of Bina Marga Makassar Civil Servant and to determine the form of preparation of financial statements in accordance with the Financial Accounting Standards for Entities Without Public Accountability (SAK ETAP) at the Cooperative of Bina Marga Makassar Civil Servant. This study uses a descriptive method using a quantitative approach based on a case study on the 2021 financial statements of the Cooperative of Bina Marga Makassar Civil Servant. The assessment indicator as a form of implementing SAK ETAP (2016) in this study is that the financial statements and their components are in accordance with the types and components of financial statements regulated in SAK ETAP (2016).

The results of the study indicate that the financial statements of the Cooperative of Bina Marga Makassar Civil Servant have not applied the SAK ETAP accounting standard because there are financial posts that are not following the regulatory provisions. In addition, the financial reports prepared by the Cooperative of Bina Marga Makassar Civil Servant are in the form of a profit and loss statement, a report for the distribution of the remaining operating results, and a trial balance report. The financial statements regulated in the Public Accountability Financial Accounting Standards (SAK ETAP) are profit and loss statements, changes in equity reports, balance reports, cash flow statements, and notes on financial statements.

Keywords: Cooperatives, Financial Statements, SAK ETAP.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUNG	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN LEMBAR PERSETUJUAN	ii
HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PRAKATA	v
HALAMAN ABSTRAK	vii
HALAMAN DAFTAR ISI	ix
HALAMAN DAFTAR TABEL	xii
HALAMAN DAFTAR GAMBAR	xiii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Kegunaan Penelitian	7
1.4.1 Kegunaan Teoritis	7
1.4.2 Kegunaan Praktis	8
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Dasar Hukum Koperasi	9
2.2 Karakteristik Koperasi	10
2.3 Tujuan Koperasi	10
2.4 Fungsi Koperasi	11
2.5 Prinsip-prinsip Koperasi	11
2.6 Jenis-jenis Koperasi	14
2.7 Pengertian Laporan Keuangan	15

2.8 Tujuan Laporan Keuangan	16
2.9 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)	17
2.10 Jenis-jenis Laporan Keuangan berdasarkan SAK ETAP	18
2.11 Penelitian Terdahulu	22
2.12 Kerangka Berpikir	23
BAB III METODE PENELITIAN	25
3.1 Rancangan Penelitian	25
3.2 Tempat dan Waktu	25
3.3 Jenis dan Sumber Data	25
3.4 Teknik Pengumpulan Data	26
3.5 Analisis Data	27
3.6 Pengecekan Validitas Temuan	29
3.7 Tahap-tahap Penelitian	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
4.1 Gambaran Umum Koperasi	31
4.1.1 Sejarah Singkat Koperasi	31
4.1.2 Visi dan Misi Koperasi	31
4.1.3 Struktur Organisasi Koperasi	32
4.1.4 Tugas dan Wewenang	33
4.2 Hasil Penelitian	34
4.2.1 Laporan Keuangan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Bina Marga Makassar	34
4.2.2 Laporan Keuangan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Bina Marga Makassar berdasarkan SAK ETAP	40
4.3 Pembahasan	48
4.3.1 Analisis Penerapan SAK ETAP dalam Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Bina Marga Makassar	48
4.3.2 Perbandingan Bentuk Penyusunan Laporan Keuangan KPN Bina Marga Makassar dengan SAK ETAP	51

BAB V PENUTUP	52
5.1 Kesimpulan	52
5.2 Saran	52
5.2.1 Bagi Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Bina Marga Makassar	52
5.2.2 Bagi Peneliti Selanjutnya.....	53
DAFTAR PUSTAKA	54



UNIVERSITAS FAJAR

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	24
Tabel 4.1 Perbandingan Bentuk Laporan Keuangan.....	54



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	24
Gambar 4.1 Struktur Organisasi	32
Gambar 4.2 Laporan Laba Rugi KPN Bina Marga Makassar	36
Gambar 4.3 Laporan Pembagian SHU KPN Bina Marga Makassar	37
Gambar 4.4 Laporan Neraca Saldo KPN Bina Marga Makassar.....	38
Gambar 4.5 Laporan Laba Rugi KPN Bina Marga Makassar Berdasarkan SAK ETAP	40
Gambar 4.6 Laporan Perubahan Ekuitas KPN Bina Marga Makassar Berdasarkan SAK ETAP	42
Gambar 4.7 Neraca KPN Bina Marga Makassar Berdasarkan SAK ETAP....	44
Gambar 4.8 Laporan Arus Kas KPN Bina Marga Makassar Berdasarkan SAK ETAP.....	46



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Permohonan Izin Penelitian	55
Lampiran 2 Laporan Laba Rugi 2021 KPN Bina Marga Makassar	56
Lampiran 3 Laporan Pembagian SHU 2021 KPN Bina Marga Makassar	57
Lampiran 4 Laporan Neraca Saldo 2021 KPN Bina Marga Makassar	58



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Koperasi merupakan jenis badan ekonomi yang memberikan karakter khusus pada perekonomian Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia mengelola jenis usaha ini, yang dijelaskan dalam UUD 1945, khususnya pasal 33 ayat (1), yang menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha kolaboratif berdasarkan asas kekeluargaan, dengan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, koperasi adalah badan hukum yang dibentuk oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan bidang budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Koperasi memainkan peran penting dalam masyarakat, terutama untuk kelas menengah ke bawah. Kekeluargaan, kesetiakawanan (solidaritas), keadilan, gotong royong, demokrasi, dan kebersamaan semuanya dapat dijadikan faktor kekuatan koperasi dalam masyarakat. Koperasi juga merupakan platform untuk demokrasi ekonomi di mana anggota, administrator, dan manajer berbagi kepemilikan. Saat ini koperasi harus membangun koperasi yang dikelola secara profesional dengan menerapkan prinsip keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas yang dapat diakui, dipahami, dan dipercaya baik oleh anggota maupun masyarakat luas. Penyusunan dan publikasi laporan keuangan organisasi merupakan salah satu bentuk transparansi yang wajib dilakukan oleh koperasi.

Laporan keuangan terutama digunakan untuk menentukan nilai sumber daya ekonomi yang digunakan untuk menjalankan operasi koperasi, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi kerja koperasi, dan membantu menentukan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebagai media transparansi dan akuntabilitas sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Kiprah laporan keuangan bagi suatu koperasi ialah hal yang sangat vital dalam menjaga kepercayaan terhadap para anggotanya. Laporan keuangan merupakan jendela primer guna melihat ke dalam entitas secara detail. (Anggita Budiati, Martha. 2018).

Koperasi wajib menyampaikan informasi keuangan kepada setiap anggota, yang dicatat dalam buku laporan pertanggungjawaban pengurus koperasi, yang dibagikan kepada setiap anggota koperasi pada Rapat Anggota Tahunan (RAT). Laporan keuangan koperasi dapat memberikan informasi tentang semua transaksi yang terjadi di koperasi selama periode tertentu, memungkinkan pengguna untuk belajar tentang manfaat menjadi anggota koperasi untuk periode tertentu, serta sumber daya ekonomi yang dimiliki, komitmen, bersih dan bernilai.

Penyusunan laporan keuangan membutuhkan suatu pedoman agar laporan keuangan dapat disusun dengan peraturan yang berlaku sehingga ada keseragaman tiap laporan keuangan yang dibuat oleh entitas pelaporan. Pedoman penyusunan laporan keuangan bertujuan untuk memudahkan pembaca laporan keuangan untuk menginterpretasikan dan membandingkan laporan keuangan tiap perusahaan.

Pedoman penyusunan laporan keuangan UMKM seperti koperasi telah disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia

(DSAK-IAI). Pedoman tersebut dinamakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). SAK ETAP merupakan solusi bagi usaha kecil dan menengah yang mengalami kesulitan dalam menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) saat ini. Standar Akuntansi Keuangan adalah seperangkat pedoman yang diikuti organisasi ketika menyiapkan laporan keuangan. PSAK No. 27 mengatur laporan keuangan koperasi pada awalnya. Prinsip kekayaan bersih, prinsip kewajiban, prinsip aset, prinsip pendapatan dan beban, dan prinsip laporan keuangan koperasi membentuk kerangka kerja. Pada perjalanannya pedoman ini dicabut dan digantikan dengan SAK ETAP sebagai konvergensi dari IFRS SME.

Pada tanggal 17 Juli 2009, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), sebagai badan penyusun standar akuntansi di Indonesia, merilis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). SAK ETAP telah disahkan oleh DSAK IAI pada 19 Mei 2009, namun baru berlaku 1 Januari 2011. Kehadiran SAK ETAP diharapkan dapat mempermudah pelaporan keuangan bagi koperasi, UMKM, dan entitas lainnya tanpa pertanggungjawaban. SAK ETAP juga diharapkan dapat menjadi solusi atas permasalahan internal perusahaan, khususnya yang mempengaruhi manajemen. Standar ini dimaksudkan untuk digunakan oleh Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, sesuai dengan ruang lingkup SAK ETAP (IAI, 2009).

Hasil observasi sebelumnya yang dilakukan oleh Putri (2021) dengan judul “Analisis Penerapan SAK ETAP dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada Koperasi Unit Desa (KUD) Wanasari Kabupaten Brebes” menampilkan bahwa KUD Wanasari Kabupaten Brebes dalam perencanaan laporan keuangan belum sepenuhnya melaksanakan SAK ETAP. Dalam Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengelola KUD Wanasari Kabupaten

Brebes atau Laporan Anggota Tahunan yang dikumpulkan oleh KUD Wanasari Kabupaten Brebes, terdapat catatan keuangan, perhitungan hasil kerja tetap, memberikan rincian mengenai perubahan total aset, dan laporan pendapatan. Sesuai SAK ETAP, laporan anggaran terdiri dari catatan moneter, artikulasi pembayaran, pengumuman perubahan nilai, penjelasan pendapatan, dan catatan ringkasan fiskal, dengan tujuan bahwa laporan anggaran yang diperkenalkan oleh KUD Wanasari Kabupaten Brebes harus disertai catatan pada laporan anggaran. Hal ini menyebabkan perencanaan rangkuman anggaran belum sepenuhnya melaksanakan SAK ETAP dan belum terwujudnya tambahan data yang dimasukkan dalam laporan fiskal yang diharapkan oleh pihak-pihak yang membutuhkan informasi tentang laporan fiskal yang telah dimasukkan tersebut.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Kusri (2020) dengan judul “Analisis Penerapan SAK ETAP pada Laporan Keuangan BUMDES Kamboja Desa Cinta Raja” menjelaskan bahwa dalam pengelolaan keuangan pada BUMDes Kamboja masih adanya anggapan bahwa pengelolaan keuangan merupakan hal yang mudah dan sederhana. Kenyataannya pengelolaan keuangan pada BUMDes Kamboja terutama dalam hal penyusunan laporan keuangan masih belum mengacu kepada SAK ETAP. Hal ini terbukti dari laporan keuangan hanya terdiri dari Laporan Laba Rugi dan Neraca. Selain itu, pelaporan laporan keuangan oleh BUMDes Kamboja Desa Cinta Raja seringkali tidak tepat waktu tiap bulannya. Hal ini dibuktikan dari laporan tercatat oleh desa, dimana pelaporan atas laporan keuangan BUMDes Kamboja Desa Cinta Raja dilakukan sebelum tanggal 10 setiap bulannya. Hal ini menjadi permasalahan yang harus dievaluasi oleh BUMDes Kamboja Desa Cinta Raja. Masalah utama penyebab keterlambatan

pelaporan laporan keuangan yaitu kurangnya kemampuan SDM dalam penyesuaian laporan keuangan sesuai ketentuan SAK ETAP.

Srikalimah, dkk (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP pada Koperasi Wanita “Usaha Bersama” mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan pencatatan keuangan yang dilakukan selama ini sepenuhnya belum berdasarkan SAK ETAP dengan benar. Dalam SAK ETAP dijelaskan bahwa metode pengakuan yang digunakan adalah dengan menggunakan *Accrual Basis*, sedangkan di koperasi wanita “usaha bersama” masih menggunakan cash basis dalam menyusun laporan keuangannya.

Penelitian lain ditunjukkan oleh Simatupang, dkk (2018) dalam judul “Analisis Penerapan SAK ETAP dalam Penyajian Laporan Keuangan pada Koperasi Pegawai Negeri SMPN 7 Pematang Siantar” bahwa para pengurus Koperasi Pegawai Negeri SMPN 7 P. Siantar merupakan para guru dengan bidang ilmu yang berbeda-beda. Sehingga ada beberapa pengurus koperasi yang belum memahami penyusunan laporan keuangan koperasi yang berbasis SAK ETAP. Disamping itu kurangnya pelatihan mengenai penyusunan laporan keuangan koperasi. Penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan SAK ETAP menjadi penting. Standar ini sudah mulai menjadi prioritas sosialisasi ke UMKM dan Koperasi binaan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Penelitian lain yang juga dilakukan oleh Nurdiansyah, dkk (2016) dengan judul “Analisis Penerapan SAK ETAP dalam Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi (Studi Kasus pada KOPKAR PDAM Tirta Sanita)” mengungkapkan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh bagian pembukuan urusan

keuangan Koperasi Karyawan PDAM Kota Bogor Tirta Sanita sudah melakukan penyesuaian untuk mengimplementasikan SAK ETAP dalam penyusunan laporan keuangannya, namun belum sesuai dengan apa yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan – Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), karena masih belum semua penyesuaian dalam SAK ETAP telah diterapkan dalam penyajian laporan keuangannya. Kendalanya hanya masih harus banyak mempelajari SAK ETAP dalam penyusunan laporan keuangannya.

Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Bina Marga Makassar merupakan koperasi simpan pinjam yang berada dibawah naungan Kementerian Kehutanan. Koperasi ini telah berdiri selama 4 tahun dimulai sejak 2017 hingga saat ini dan telah beranggotakan 75 orang. Dalam pelaksanaan kegiatannya, koperasi ini dikelola oleh seorang ketua, sekretaris, dan bendahara. Masing-masing dari mereka memiliki latar belakang ilmu kehutanan. Hal ini menjadi salah satu kendala khususnya dalam pengelolaan keuangannya karena bendahara koperasi Bina Marga tidak memiliki ilmu keuangan atau pembukuan sehingga segala transaksi yang terjadi dalam rangka mendukung kegiatan operasional dicatat dan dilaporkan sesuai ilmu pengetahuan yang dimilikinya.

Kondisi Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Bina Marga Makassar saat ini adalah transaksi keuangan yang telah terjadi diinput ke dalam sebuah aplikasi keuangan untuk memudahkan proses pembukuannya. Namun, laporan yang disajikan oleh aplikasi tersebut hanya berupa laporan neraca dan laporan laba rugi sehingga laporan keuangan yang disusun belum sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Keuangan untuk koperasi yakni SAK ETAP.

Berdasarkan uraian yang tertera, maka peneliti mengajukan judul penelitian yang berjudul **“Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan**

Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Bina Marga Makassar”.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah yang dapat ditarik adalah:

1. Bagaimana bentuk penyusunan laporan keuangan yang telah dibuat oleh Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Bina Marga Makassar?
2. Bagaimana bentuk penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Bina Marga Makassar?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan pada rumusan masalah, tujuan pada penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bentuk penyusunan laporan keuangan yang telah dibuat oleh Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Bina Marga Makassar.
2. Untuk mengetahui bentuk penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Bina Marga Makassar.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegiatan penelitian ini mencakup 2 kegunaan, yaitu:

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Output dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebagai bahan referensi atau sumber informasi untuk peneliti selanjutnya, khususnya bagi yang ingin mengadakan kegiatan sejenis pada masa yang akan datang.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharap dapat membagi solusi untuk pengelola dan anggota koperasi berupa rekomendasi perbaikan terhadap bentuk laporan keuangan yang selama ini dibuat serta menjadi bahan pertimbangan bagi pihak pengelola koperasi untuk senantiasa melakukan kegiatan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel terhadap anggota sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penyusunan laporan akhir ini, perlu dibatasi ruang lingkup pembahasannya sehingga penulisan laporan akhir ini dapat dilakukan secara lebih terarah dan dapat mencapai tujuan serta sesuai dengan permasalahan yang ada. Sesuai data yang diperoleh, maka pembahasan dibatasi pada analisis komponen laporan keuangan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Bina Marga Makassar tahun 2021.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Dasar Hukum Koperasi

Berdasarkan UU No. 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian, "Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas-asas kekeluargaan." Menurut UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, "Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang berdasarkan atas asas kekeluargaan."

Menurut UUD 1945 Pasal 3 Ayat 1, "Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum yang berlandaskan pada asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi." Kegiatan usaha koperasi merupakan penjabaran dari UUD 1945 pasal 33 Ayat 1. Melalui penjelasan tersebut, koperasi berkedudukan sebagai soko guru perekonomian nasional dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem perekonomian nasional.

Berdasarkan beberapa pengertian terkait koperasi diatas, dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah sebuah badan usaha yang terdiri atas sekumpulan orang yang kemudian disebut anggota koperasi untuk melakukan kegiatan sosial sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan dengan tujuan menyejahterakan anggotanya.

2.2 Karakteristik Koperasi

Menurut PSAK No. 27 Tahun 2007, karakteristik utama koperasi yang membedakannya dengan badan usaha lain adalah status keanggotaan koperasi.

Anggota koperasi memiliki identitas ganda (*the dual identity of the member*), yaitu sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi (*user own oriented firm*). Oleh karena itu, terdapat beberapa hal penting mengenai karakteristik koperasi, yaitu:

1. Koperasi dimiliki oleh anggota yang bergabung atas dasar sedikitnya ada satu kepentingan ekonomi yang sama;
2. Koperasi didirikan dan dikembangkan berlandaskan nilai-nilai percaya diri untuk menolong dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, kesetiakawanan, keadilan, persamaan, dan demokrasi. Selain itu, anggota-anggota koperasi percaya pada nilai-nilai etika kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap orang lain;
3. Koperasi didirikan, dimodali, dibiayai, diatur, dan diawasi serta dimanfaatkan sendiri oleh anggotanya;
4. Tugas pokok badan usaha koperasi adalah menunjang kepentingan ekonomi anggotanya dalam rangka memajukan kesejahteraan anggota (*promotion of the members welfare*);
5. Jika terdapat kelebihan kemampuan pelayanan koperasi kepada anggotanya, maka kelebihan kemampuan pelayanan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang non-anggota koperasi.

2.3 Tujuan Koperasi

Menurut Undang-Undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992, koperasi mempunyai tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut serta dalam pembangunan tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, berkeadilan, dan masyarakat sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

2.4 Fungsi Koperasi

Dalam Pasal 4 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian selanjutnya disebutkan bahwa fungsi koperasi diantaranya:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko guru.
4. Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

2.5 Prinsip-prinsip Koperasi

Menurut sidang yang telah dilaksanakan oleh anggota ICA (*International Cooperative Alliance*) di Wina pada tahun 1966 merumuskan prinsip-prinsip akuntansi sebagai berikut:

1. Keanggotaan koperasi secara terbuka tanpa adanya pembatasan yang dibuat-buat.
2. Kepemimpinan yang demokrasi atas dasar satu orang, satu suara.
3. Modal menerima bunga yang terbatas itu pun bila ada.
4. SHU dibagi menjadi tiga, yaitu:
 - 1) Sebagian untuk cadangan;
 - 2) Sebagian untuk masyarakat;
 - 3) Sebagian untuk dibagikan kembali pada anggota sesuai dengan jasa yang telah dilakukannya.
5. Semua koperasi harus melaksanakan pendidikan secara terus-menerus.

6. Gerakan koperasi harus melaksanakan kerjasama yang erat, baik di tingkat regional, nasional maupun internasional.

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Koperasi di Indonesia mempunyai beberapa prinsip atau pilar antara lain:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.

Koperasi bersifat sukarela mengandung makna yakni setiap orang atau seseorang tidak dipaksakan untuk ikut serta dalam keanggotaan koperasi, tetapi berdasarkan kesadaran dari diri orang itu sendiri yang akan mendorong dirinya untuk ikut berpartisipasi dalam keanggotaan koperasi. Koperasi bersifat terbuka berarti setiap orang bisa menjadi anggota koperasi bila memenuhi syarat-syarat keanggotaan atas dasar persamaan kepentingan ekonomi atau karena kepentingan ekonominya dapat dilayani oleh koperasi. Dengan kata lain, keanggotaan koperasi terbuka bagi semua orang yang memenuhi syarat-syarat keanggotaan.

2. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi.

Pengelolaan dilakukan secara demokratis yang didasarkan atas persamaan hak suara para anggotanya. Pemilihan pengurus dan pengawas koperasi dilakukan pada saat rapat anggota. Setiap anggota yang hadir memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih menjadi pengelola koperasi.

3. Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha yang dilakukan masing-masing anggota.

SHU adalah selisih antara pendapatan yang diperoleh koperasi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan dalam pengelolaan usaha koperasi. Pendapatan koperasi diperoleh dari pelayanan anggota dan masyarakat. Setiap anggota yang memberikan partisipasi aktif dalam usaha koperasi akan mendapat bagian sisa hasil usaha yang lebih besar daripada anggota yang pasif.

4. Pemberian jasa yang terbatas terhadap modal.

Anggota adalah pemilik koperasi sekaligus sebagai modal dan pelanggan. Simpanan yang disetorkan oleh anggota kepada koperasi akan digunakan koperasi untuk melayani anggota. Modal dalam koperasi pada dasarnya digunakan melayani anggota dan masyarakat disekitarnya, dengan mengutamakan pelayanan bagi anggota. Diharapkan koperasi akan memperoleh nilai lebih dari layanan ini daripada selisih antara biaya layanan dan pendapatan. Akibatnya, imbalan atas modal yang diberikan oleh anggota atau sebaliknya terbatas dan tidak semata-mata berdasarkan jumlah modal yang diberikan. Terbatas artinya pemberian balas jasa atas modal yang ditanamkan pada koperasi akan disesuaikan dengan kemampuan koperasi.

5. Kemandirian

Kemandirian pada koperasi dimaksudkan bahwa koperasi harus mampu berdiri sendiri dalam hal pengambilan keputusan usaha dan organisasi. Dalam kemandirian ini terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, dan keberanian mempertanggungjawabkan segala tindakan atau perbuatan sendiri dalam pengelolaan usaha dan organisasi.

6. Pendidikan perkoperasian.

Keberhasilan koperasi sangat erat hubungannya dengan partisipasi aktif setiap anggotanya. Agar anggota koperasi berkualitas baik, berkemampuan tinggi, dan berwawasan luas, maka pendidikan adalah mutlak. Pendidikan perkoperasian merupakan bagian yang tidak terpisah dalam mewujudkan kehidupan perkoperasian, agar sesuai dengan jati dirinya. Melalui pendidikan, anggota dipersiapkan dan dibentuk untuk menjadi anggota yang memahami serta menghayati nilai-nilai dan prinsip-prinsip serta praktik-praktik koperasi.

7. Kerjasama antarkoperasi.

Koperasi-koperasi ada yang mempunyai bidang usaha yang sama, dan ada pula yang berbeda serta tingkatan yang berbeda.

2.6 Jenis-jenis Koperasi

Menurut Undang-Undang terbaru No. 17 Pasal 83 Tahun 2012, jenis koperasi dibagi menjadi empat, yaitu:

1. Koperasi Simpan Pinjam (KSP)

Koperasi simpan pinjam merupakan koperasi yang mempunyai usaha tunggal ialah menampung simpanan anggota serta melayani peminjaman. Anggota yang menabung (menyimpan) akan memperoleh imbalan jasa serta untuk peminjam dikenakan jasa. Besarnya jasa bagi penabung serta peminjam ditetapkan lewat rapat anggota. Dari sinilah aktivitas usaha koperasi bisa dikatakan “dari, oleh, dan untuk anggota”.

2. Koperasi Konsumen

Koperasi konsumen adalah koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan non-anggota.

3. Koperasi Produsen

Koperasi yang beranggotakan para pengusaha kecil (UKM) dengan menjalankan kegiatan pengadaan bahan baku dan penolong untuk anggotanya. Kegiatan penyelenggaraan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan anggota kepada anggota dan non-anggota.

4. Koperasi Jasa

Koperasi jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh anggotanya yang berperan sebagai pengguna atau pemilik layanan jasa koperasi.

2.7 Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Suteja (2018), laporan keuangan adalah suatu laporan yang menggambarkan posisi keuangan dari hasil suatu proses akuntansi selama periode tertentu yang sebagai alat komunikasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut Kasmir (2017), laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Alasan laporan keuangan untuk mengungkap keadaan organisasi saat ini adalah kondisi aktualnya. Keadaan organisasi saat ini adalah kondisi keuangan organisasi pada tanggal tertentu (untuk laporan aset) dan periode tertentu (untuk laporan kinerja).

Menurut Bahri (2016), laporan keuangan adalah sinopsis dari pencatatan pertukaran moneter yang terjadi selama jangka waktu yang diumumkan dan dibuat untuk mewakili tugas yang ditunjuk kepadanya oleh pemilik organisasi. Manajemen perusahaan memikul tanggung jawab atas pengaturan dan pertunjukkan laporan anggaran organisasi. Laporan keuangan adalah data yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang terlibat erat dengan laporan tersebut.

Mengingat beberapa pengertian yang berkaitan dengan laporan keuangan di atas, maka dapat diduga bahwa laporan keuangan adalah laporan yang menyediakan posisi dan kinerja keuangan suatu entitas yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan. Laporan keuangan pada umumnya terdiri dari laporan laba rugi, laporan neraca, dan laporan perubahan modal, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, dan lainnya.

2.8 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut IAI dalam SAK ETAP 2.1 (2016), tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menerangkan apa yang telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Menurut Kasmir (2016), laporan keuangan bertujuan untuk memberikan data keuangan suatu perusahaan, baik pada saat tertentu maupun pada periode tertentu. Laporan keuangan juga dapat disusun secara tiba-tiba sesuai dengan kebutuhan perusahaan maupun secara berkala. Laporan keuangan mampu memberikan data keuangan kepada pihak dalam serta luar perusahaan yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan.

Beberapa tujuan penyusunan laporan keuangan, diantaranya:

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva yang dimiliki perusahaan pada saat itu;
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat itu;
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu;
4. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu;
5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan;
6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode;
7. Memberikan informasi tentang catatan atas laporan keuangan.

2.9 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) adalah prinsip pembukuan moneter yang diharapkan bagi pihak yang tidak bertanggungjawab kepada masyarakat. Biasanya SAK ETAP diterapkan oleh usaha kecil dan menengah, karena mereka tidak menaruh bagiaannya di pasar modal. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan untuk koperasi saat ini adalah SAK ETAP 2016. Penggunaan SAK ETAP sendiri merupakan pengaturan pilihan IAI di bawah Menteri Keuangan yang membatalkan PSAK No. 27 tentang Akuntansi Koperasi terhitung pada 24 Oktober 2016.

Pada dasarnya, koperasi adalah sebuah substansi namun sebenarnya tidak memiliki tanggung jawab publik, jenis tanggung jawab koperasi dibatasi secara khusus untuk individu-individu yang terdapat didalamnya. Menurut IAI (2016), Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan oleh Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP), yaitu:

1. Entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan
2. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.

SAK ETAP bertujuan untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapannya dan diharapkan dapat memberikan akses ETAP yang mudah ke pendanaan bank. SAK ETAP merupakan SAK yang berdiri sendiri yang tidak mengacu pada SAK Umum, sebagian besar menggunakan konsep biaya historis, mengatur transaksi yang dilakukan oleh ETAP, bentuk pengaturan yang lebih sederhana dalam hal perlakuan akuntansi, dan relatif tidak berubah selama beberapa tahun.

2.10 Jenis-jenis Laporan Keuangan berdasarkan SAK ETAP

Laporan keuangan yang dimuat dalam SAK ETAP (2016) terdiri dari lima, yaitu:

1. Neraca atau Laporan Posisi Keuangan

Dalam SAK ETAP, laporan posisi keuangan terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas untuk periode tertentu (IAI, 2016). Neraca sedikitnya mencakup pos-pos berikut:

- 1) Kas dan setara kas
- 2) Piutang usaha dan piutang lainnya
- 3) Persediaan
- 4) Properti investasi
- 5) Aset tetap
- 6) Aset tidak berwujud
- 7) Utang usaha dan utang lainnya
- 8) Aset dan kewajiban pajak
- 9) Kewajiban diestimasi
- 10) Ekuitas

2. Laporan Laba Rugi atau Perhitungan Hasil Usaha

Perhitungan hasil usaha adalah laporan yang menggambarkan efek samping dari aktivitas koperasi dalam satu periode pembukuan. Tampilan terakhir dari perhitungan hasil kerja dikenal sebagai Sisa Hasil Usaha (SHU). SHU memperkirakan seberapa besar manfaat serta menggambarkan keuntungan yang berbeda bagi individu. Bagaimanapun, dalam pengaturan baru SAK ETAP, perhitungan hasil usaha berubah menjadi artikulasi untung dan rugi. Dalam SAK ETAP (2016), laporan kinerja pada dasarnya mencakup hal-hal yang terdiri dari pendapatan, biaya operasional, biaya pajak, laba bersih atau rugi bersih.

3. Laporan Perubahan Ekuitas

SAK ETAP menjelaskan bahwa laporan perubahan ekuitas bertujuan menyajikan laba atau rugi entitas untuk suatu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut, dan (tergantung pada format laporan perubahan ekuitas yang dipilih oleh entitas) jumlah investasi, dan dividen dan distribusi lain ke pemilik ekuitas selama periode tersebut (IAI, 2016). Komponen-komponen laporan perubahan ekuitas akan memperlihatkan perubahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, hibah cadangan, sisa hasil usaha yang tidak dibagikan pada periode akuntansi. Informasi yang disajikan di laporan perubahan ekuitas meliputi:

- 1) Sisa hasil usaha untuk periode;
- 2) Pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas;
- 3) Pengaruh perubahan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui, sesuai kebijakan akuntansi, estimasi, dan kesalahan untuk setiap komponen ekuitas.
- 4) Rekonsiliasi antara jumlah yang tercatat pada awal dan akhir periode untuk setiap komponen ekuitas, yang membuktikan perubahan secara terpisah dari:
 - a. Sisa hasil usaha
 - b. Pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas
 - c. Jumlah SHU yang dibagikan dan distribusi lain untuk anggota, yang menunjukkan secara terpisah komponen simpanan anggota.

4. Laporan Arus Kas

Dalam SAK ETAP dijelaskan bahwa laporan arus kas menyajikan informasi tentang perubahan uang tunai dan setara tunai dalam suatu entitas untuk periode yang dilaporkan dalam komponen yang terpisah terdiri dari aktivitas

operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan (IAI, 2016). Laporan arus kas terdiri dari:

1) Aktivitas Operasi

Arus kas yang berasal dari aktivitas utama koperasi. Arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa serta kondisi lain yang memengaruhi besaran SHU.

2) Aktivitas Investasi

Arus kas penerimaan dan pengeluaran sehubungan dari sumber daya yang digunakan untuk tujuan menghasilkan pendapatan masa depan.

3) Aktivitas Pendanaan

Arus kas penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan sumber pendanaan untuk tujuan menghasilkan pendapatan masa depan.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Menurut IAI dalam SAK ETAP (2016), Catatan atas laporan keuangan berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. Perlakuan akuntansi yang harus diinformasikan antara lain:

1) Gambaran umum koperasi

2) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan

3) Kebijakan akuntansi tentang pengakuan, pengukuran dan perlakuan: transaksi dalam mata uang asing, kas dan setara kas, piutang, penilaian persediaan, biaya dibayar dimuka, aset tetap, pajak penghasilan, dan sebagainya.

- 4) Penjelasan yang mendukung pos-pos dan perhitungan sisa hasil usaha yang nilainya material (berdasarkan ketentuan pada masing-masing koperasi) sesuai dengan urutan penyajian setiap komponen laporan keuangan dan urutan penyajian pos-pos tersebut.
- 5) Catatan atas laporan keuangan koperasi harus jelas dan nyata, memuat informasi lain seperti:
 - a. Kegiatan usaha utama koperasi
 - b. Kegiatan pelayanan koperasi kepada anggota
 - c. Kegiatan bisnis koperasi dengan non anggota yang ditargetkan dan yang sudah dilaksanakan
 - d. Informasi mengenai kegiatan bisnis koperasi dengan non anggota yang ditargetkan dan yang sudah dilaksanakan
 - e. Aktivitas koperasi untuk mempromosikan ekonomi dan pengembangan kemampuan sumber daya anggota melalui pendidikan dan pelatihan.

2.11 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

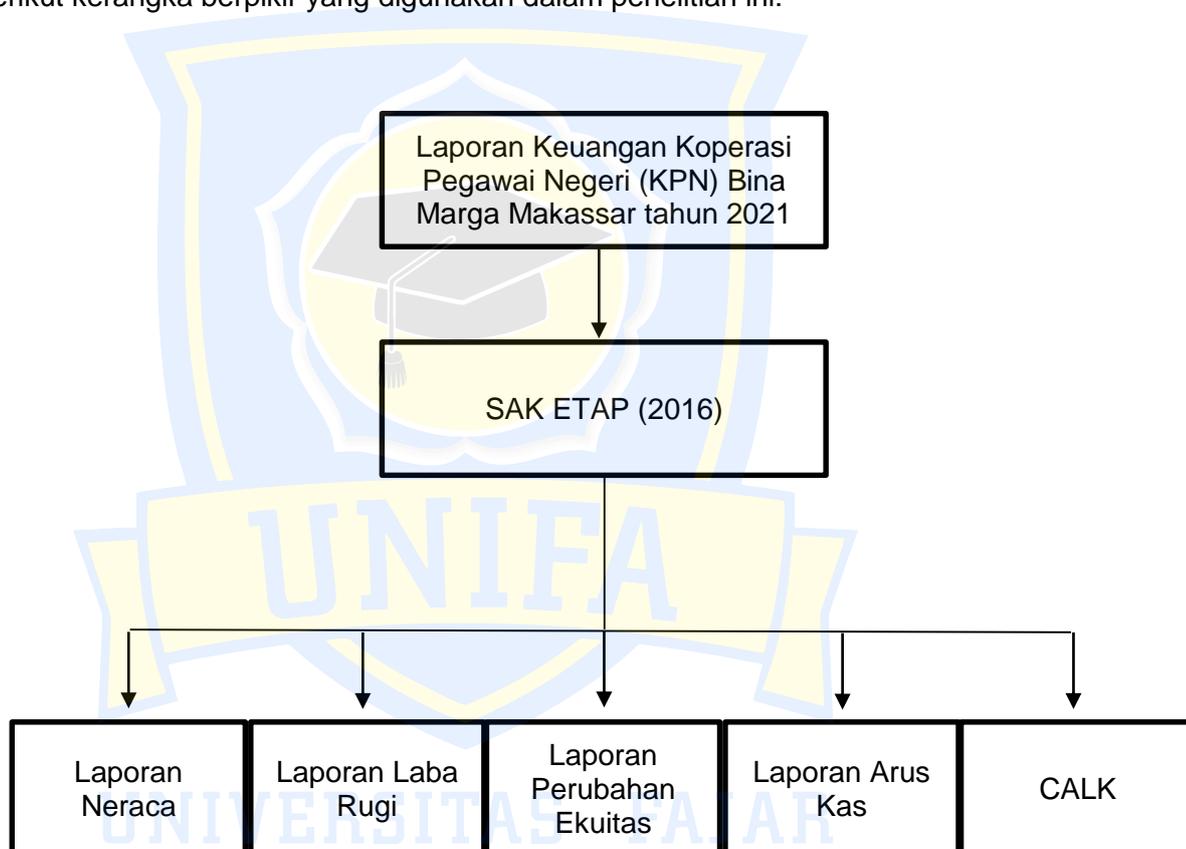
No.	Judul	Nama Peneliti	Hasil Penelitian
1	Analisis Penerapan SAK ETAP dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada Koperasi Unit Desa (KUD) Wanasari Kabupaten Brebes	Ludwi Jayanti Jamil Putri	Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh Koperasi Unit Desa (KUD) Wanasari Kabupaten Brebes terdiri dari neraca, perhitungan sisa hasil usaha, laporan perubahan kekayaan bersih, dan laporan arus kas. Koperasi Unit Desa (KUD) Wanasari Kabupaten Brebes dalam penyusunan laporan keuangannya belum secara penuh menerapkan SAK ETAP karena tidak menyusun catatan atas laporan keuangan yang belum sepenuhnya memenuhi persyaratan yang sesuai dengan SAK ETAP.
2	Analisis Penerapan SAK ETAP pada Laporan Keuangan	Henny Kusriani	Dalam pelaporan keuangannya, BUMDes Kamboja Desa Cinta Raja Kabupaten Langkat tidak menyajikan

	BUMDES Kamboja Desa Cinta Raja		laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan juga catatan atas laporan keuangan.
3	Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP pada Koperasi Wanita “Usaha Bersama”	Srikalimah, Umi Nadhiroh, dan Siti Rochmah Indriani	Koperasi Wanita “Usaha Bersama” membuat laporan keuangan dua jenis laporan yaitu laporan Laba/ Rugi dan Neraca, dan komponen-komponen didalam laporan yang disajikan belum sesuai SAK ETAP. Dari dua jenis laporan yang dibuat oleh Koperasi Wanita “Usaha Bersama” belum sesuai SAK ETAP.
4	Analisis Penerapan SAK ETAP dalam Penyajian Laporan Keuangan pada Koperasi Pegawai Negeri SMPN 7 Pematang Siantar	Eva Malina Simatupang dan Arlina Pratiwi Purba	Hasil analisis dan penelusuran terhadap KPN SMP N 7 P. Siantar mengenai penyajian laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP diperoleh kesimpulan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh Koperasi Pegawai Negeri (KPN) SMP N 7 P.Siantar belum sesuai dengan SAK ETAP. Selain itu, jenis dan format laporan keuangan yang disajikan oleh Koperasi Pegawai Negeri (KPN) SMP N 7 P.Siantar hanya sebatas Neraca dan Perhitungan Sisa Hasil Usaha (Laporan Laba Rugi).
5	Analisis Penerapan SAK ETAP dalam Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi (Studi Kasus pada KOPKAR PDAM Tirta Sanita)	Hadi Nurdiansyah dan Hendra Setiawan	Laporan keuangan yang disusun oleh bagian pembukuan urusan keuangan Koperasi Karyawan PDAM Kota Bogor Tirta Sanita sudah melakukan penyesuaian untuk menerapkan SAK ETAP dalam penyusunan laporan keuangannya, namun belum sesuai dengan apa yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan – Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), karena masih belum semua penyesuaian dalam SAK ETAP telah diterapkan dalam penyajian laporan keuangannya.

2.12 Kerangka Berpikir

Transaksi keuangan yang telah terjadi pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Bina Marga Makassar diinput ke dalam sebuah aplikasi keuangan untuk memudahkan proses pembukuannya. Namun, laporan yang disajikan oleh aplikasi tersebut hanya berupa laporan neraca dan laporan laba rugi sehingga laporan keuangan yang disusun belum sesuai dengan ketentuan Standar

Akuntansi Keuangan untuk koperasi yakni SAK ETAP (2016). Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti akan melakukan penelitian terhadap laporan keuangan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Bina Marga Makassar dengan menyajikan laporan keuangan yang telah disusun sebelumnya, menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP (2016), lalu menganalisis bentuk penerapan SAK ETAP dalam laporan keuangan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Bina Marga Makassar termasuk komponen-komponen didalamnya. Berikut kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini:



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dipaparkan, dapat ditentukan bahwa penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan secara kuantitatif. Penelitian deskriptif menurut Sugiyono (2016) adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Metode penelitian kuantitatif sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2016) adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian serta analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

3.2 Tempat dan Waktu

Penelitian dilakukan pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Bina Marga Makassar yang berlokasi di Jalan Perintis Kemerdekaan KM. 17, Pai, Biringkanaya, Kota Makassar. Penelitian dilakukan pada bulan Februari - Maret 2022.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dokumenter. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder menurut Sugiyono (2016) adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder digunakan untuk mendukung informasi yang didapatkan dari sumber data primer yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu,

buku, laporan-laporan kegiatan yang diadakan oleh perpustakaan dan sebagainya. Jenis data sekunder pada penelitian ini adalah bersumber dari catatan-catatan koperasi atau data transaksi keuangan koperasi yakni laporan keuangan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Bina Marga Makassar sejak Januari-Desember tahun 2021.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara yaitu metode untuk mendapatkan data dengan cara melakukan tanya jawab langsung kepada bendahara dan ketua di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Bina Marga Makassar untuk mendapatkan data yang mendukung penelitian ini, seperti sejarah berdirinya koperasi, kebijakan yang ditetapkan oleh koperasi, proses kerja pengelola koperasi, dan data laporan keuangan tahun 2021.

2. Pengamatan (*Observation*)

Pengamatan (*Observation*) yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung pada objek yang diteliti yaitu terhadap aktivitas operasional yang berkaitan erat dengan masalah penyusunan laporan keuangan pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Bina Marga Makassar.

3. Analisis Dokumen

Analisis dokumen dilaksanakan dengan mengumpulkan dan memahami data-data dan arsip yang berhubungan dengan proses penelitian ini seperti kebijakan koperasi, dokumen transaksi yang terjadi selama tahun 2021, aplikasi keuangan yang digunakan, laporan keuangan periode sebelumnya, serta dokumen pendukung penelitian lainnya.

3.5 Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif berlandaskan studi kasus pada laporan keuangan tahun 2021 Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Bina Marga Makassar. Indikator penilaian sebagai bentuk penerapan SAK ETAP (2016) dalam penelitian ini adalah penyajian laporan keuangan dan komponen-komponennya telah sesuai dengan jenis dan komponen laporan keuangan yang diatur dalam SAK ETAP (2016), diantaranya:

1. Laporan Neraca, minimal mencakup pos-pos berikut:
 - 1) Kas dan setara kas
 - 2) Piutang usaha dan piutang lainnya
 - 3) Persediaan
 - 4) Properti investasi
 - 5) Aset tetap
 - 6) Aset tidak berwujud
 - 7) Utang usaha dan utang lainnya
 - 8) Aset dan kewajiban pajak
 - 9) Kewajiban diestimasi
 - 10) Ekuitas
2. Laporan Laba Rugi, minimal mencakup pos-pos yang terdiri dari pendapatan, beban operasional, beban pajak, laba atau rugi neto.
3. Laporan Perubahan Ekuitas, minimal mencakup:
 - 1) Sisa hasil usaha untuk periode.
 - 2) Pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas.

- 3) Pengaruh perubahan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui, sesuai kebijakan akuntansi, estimasi, dan kesalahan untuk setiap komponen ekuitas.
- 4) Rekonsiliasi antara jumlah yang tercatat pada awal dan akhir periode untuk setiap komponen ekuitas, yang menunjukkan perubahan secara terpisah dari:
 - a. Sisa hasil usaha
 - b. Pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas
 - c. Jumlah SHU yang dibagikan dan distribusi lain untuk anggota, yang menunjukkan secara terpisah komponen simpanan anggota.
4. Laporan Arus Kas, yang terdiri dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan.
5. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), perlakuan akuntansi yang harus diinformasikan antara lain:
 - 1) Gambaran umum koperasi
 - 2) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan
 - 3) Kebijakan akuntansi tentang pengakuan, pengukuran dan perlakuan: transaksi dalam mata uang asing, kas dan setara kas, piutang, penilaian persediaan, biaya dibayar dimuka, aset tetap, pajak penghasilan, dan sebagainya.
 - 4) Penjelasan yang mendukung pos-pos dan perhitungan sisa hasil usaha yang nilainya material (berdasarkan ketentuan pada masing-masing koperasi) sesuai dengan urutan penyajian setiap komponen laporan keuangan dan urutan penyajian pos-pos tersebut.
 - 5) Catatan atas laporan keuangan koperasi harus jelas dan nyata, memuat informasi lain seperti:

- a. Kegiatan usaha utama koperasi
- b. Kegiatan pelayanan koperasi kepada anggota
- c. Kegiatan bisnis koperasi dengan non anggota yang ditargetkan dan yang sudah dilaksanakan
- d. Informasi mengenai kegiatan bisnis koperasi dengan non anggota yang ditargetkan dan yang sudah dilaksanakan
- e. Aktivitas koperasi untuk mempromosikan ekonomi dan pengembangan kemampuan sumber daya anggota melalui pendidikan dan pelatihan.

3.6 Pengecekan Validitas Temuan

Peneliti perlu meneliti kredibilitas dari temuan-temuan yang dihasilkan dalam penelitian ini agar dapat memperoleh temuan dan interpretasi yang lengkap. Hal yang perlu dilakukan oleh peneliti adalah:

1. Mengecek temuan dengan partisipan demi keakuratan temuan.
2. Triangulasi yaitu menggunakan beberapa sumber partisipan yang berbeda dan metode pengumpulan data berupa wawancara, pengamatan, dan analisis dokumen.
3. Mendiskusikan hasil penelitian guna menghasilkan pemahaman yang lebih luas, komprehensif, dan menyeluruh.
4. Data dalam penelitian dapat dikonfirmasi langsung kepada sumbernya.

3.7 Tahap-Tahap Penelitian

Langkah-langkah yang dilakukan dalam metode penelitian ini yaitu menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan mengklarifikasi pencatatan transaksi-transaksi di beberapa buku pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Bina Marga Makassar.

2. Mengidentifikasi dan mengklarifikasi laporan keuangan pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Bina Marga Makassar.
3. Menganalisis kesesuaian laporan keuangan yang disajikan oleh Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Bina Marga Makassar dan apabila belum sesuai dengan SAK ETAP (2016), peneliti akan menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP (2016).
4. Menarik kesimpulan sebagai suatu usaha untuk mencapai tujuan penelitian apakah Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Bina Marga Makassar sudah menyajikan laporan keuangan sesuai SAK ETAP (2016) yang nantinya bisa memberikan saran kepada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Bina Marga Makassar.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Koperasi

4.1.1 Sejarah Singkat Koperasi

Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Bina Marga Makassar adalah suatu koperasi yang didirikan pada tahun 2010 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Wilayah Makassar yang digabung dengan seluruh koperasi dibawah naungan instansi tersebut. Namun, pada tahun 2017 KPN Bina Marga mulai memisahkan diri dan berdiri sendiri dibawah naungan Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Makassar karena telah memiliki cukup pegawai untuk mengurus dan mengelola koperasi ini. Koperasi ini bergerak dibidang simpan pinjam dan pelayanan dibidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan non anggota yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para pegawai negeri selaku anggota dan non anggota koperasi. Koperasi yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan KM. 17, Pai, Biringkanaya, Kota Makassar ini telah beranggotakan 75 orang. KPN Bina Marga Makassar dibentuk dengan susunan sebagai berikut:

1. Pengawas : Sudirman Sultan S.P. M.P.
2. Pengurus
 - 1) Ketua : Junaidin S.Hut, ME., MA.
 - 2) Bendahara : Ayu Wahyuni, A.Md, S.Tr.Ak.
 - 3) Sekretaris : Silvana Arsyad, S.Hut

4.1.2 Visi dan Misi Koperasi

1. Visi

KPN Bina Marga Makassar memiliki visi sebagai berikut:

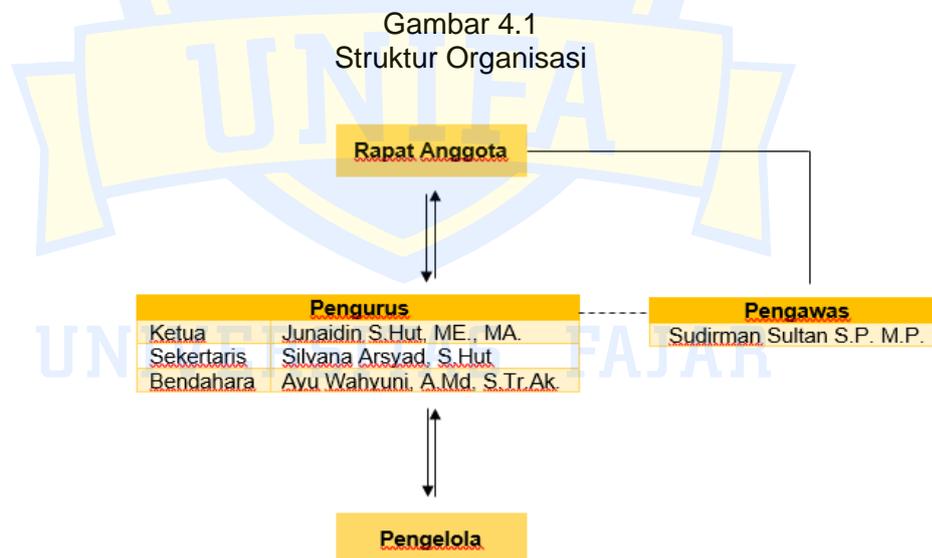
- 1) Sebagai lembaga keuangan dalam memberdayakan ekonomi rakyat.
- 2) Menjadi mitra yang handal dalam pemenuhan kebutuhan anggota.

2. Misi

Upaya untuk mewujudkan visinya, KPN Bina Marga Makassar melakukan aktivitas sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan pelayanan yang prima untuk menunjang kelancaran usaha sehingga meningkatkan kesejahteraan.
- 2) Menjalankan kegiatan usaha jasa keuangan yang efektif dan efisien.
- 3) Menjalin kemitraan dengan berbagai pihak.
- 4) Meningkatkan kinerja koperasi secara profesional agar mampu berkembang serta menguntungkan koperasi maupun mitra kerja.

4.1.3 Struktur Organisasi Koperasi



Sumber: Data Struktur Organisasi Pengurus 2021

4.1.4 Tugas dan Wewenang

1. Rapat Anggota

Rapat anggota adalah wadah dari para anggota koperasi yang diorganisasikan oleh pengurus koperasi untuk membicarakan kepentingan organisasi maupun usaha koperasi, dalam rangka mengambil suatu keputusan dengan suara terbanyak dari para anggota yang hadir. Rapat anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi mempunyai kedudukan yang sangat menentukan, berwibawa, dan menjadi sumber dari segala keputusan atau tindakan yang dilaksanakan oleh perangkat organisasi koperasi dan para pengelola usaha koperasi.

2. Pengurus

Pengurus adalah perwakilan anggota koperasi yang dipilih melalui rapat anggota, yang bertugas mengelola organisasi dan usaha koperasi.

Tugas Pengurus:

- 1) Mengelola koperasi dan usahanya
- 2) Mengajukan rancangan rencana kerja serta anggaran pendapatan dan belanja koperasi
- 3) Menyelenggarakan rapat anggota
- 4) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
- 5) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib
- 6) Memelihara buku daftar anggota dan pengurus.

Wewenang Pengurus:

- 1) Mewakili koperasi didalam dan diluar organisasi.
- 2) Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar.

- 3) Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota.

3. Pengawas

Pengawas adalah perangkat organisasi yang dipilih dari anggota dan diberi mandat untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya roda organisasi dan usaha koperasi.

4. Pengelola

Pengelola koperasi adalah mereka yang diangkat dan diberhentikan oleh pengurus untuk mengembangkan usaha koperasi secara efisien dan profesional. Oleh karena itu, kedudukan pengelola adalah sebagai pegawai atau karyawan yang diberi kuasa atau wewenang oleh pengurus. Jadi, hubungan pengelola koperasi dengan pengurus koperasi adalah hubungan kerja atas dasar perikatan dalam bentuk perjanjian atau kontrak kerja.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Laporan Keuangan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Bina Marga Makassar

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan dimana biasanya sering dilakukan audit oleh lembaga pemerintah, akuntan, firma, atau lembaga lainnya dengan tujuan untuk memastikan akurasi dan untuk tujuan pajak, pembiayaan, atau investasi.

Dalam penyusunan laporan keuangan tentu terdapat standar untuk penyusunannya. Dasar ini digunakan agar seluruh laporan keuangan perusahaan sama dan dapat dimengerti. Dasar penyusunan untuk laporan keuangan koperasi terdapat standar baru sebagai pengganti PSAK No. 27 yaitu

Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik atau disingkat SAK ETAP (2016).

Dalam SAK ETAP (2016) disebutkan bahwa laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Bentuk laporan keuangan periode 2021 Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Bina Marga Makassar dapat dilihat berikut ini:



Gambar 4.2
Koperasi Pegawai Negeri Bina Marga Makassar
Laporan Laba Rugi

LAPORAN LABA RUGI		
PERIODE JANUARI - DESEMBER 2021		
Estimasi Data Pinjaman		
No	Keterangan	Jumlah
1	Jumlah Pinjaman	Rp 322.572.000
2	Pendapatan Biaya Administrasi	Rp20.000.000
3	Pendapatan Biaya Bunga	Rp 41.645.800
Jumlah Tagihan		Rp 384.217.800
Estimasi Pendapatan Pinjaman		Rp 41.645.800
Pendapatan		
No	Keterangan	Jumlah
1	Pendapatan Pinjaman	Rp 62.073.200
2	Pendapatan Lainnya	Rp 750.000
Jumlah Pendapatan		Rp 62.823.200
Biaya-biaya		
No	Keterangan	Jumlah
1	Beban Gaji Karyawan	Rp 48.000.000
2	Biaya Listrik dan Air	Rp 3.000.000
3	Biaya Transportasi	Rp 250.000
4	Biaya Website	Rp 538.000
5	Biaya Lainnya	Rp 850.000
Jumlah Biaya		Rp 52.638.000
Labarugi		Rp 10.185.200

Sumber: Data diolah oleh Penulis (2022)

Gambar 4.3
Koperasi Pegawai Negeri Bina Marga Makassar
Laporan Pembagian SHU

LAPORAN PEMBAGIAN SHU		
PERIODE JANUARI - DESEMBER 2021		
SHU Sebelum Pajak		Rp10.185.200
Pajak PPh (5%)		Rp509.260
SHU Setelah Pajak		Rp9.675.940
Pembagian SHU untuk dana-dana	Persentase Pembagian	
Dana Cadangan	40%	Rp3.870.376
Jasa Anggota	40%	Rp3.870.376
Dana Pengurus	5%	Rp483.797
Dana Karyawan	5%	Rp483.797
Dana Pendidikan	5%	Rp483.797
Dana Sosial	5%	Rp483.797
Pembagian SHU Anggota		
Jasa Usaha	60%	Rp2.322.225
Jasa Modal	40%	Rp1.548.155
Total Pendapatan Anggota		Rp62.073.200
Total Simpanan Anggota		Rp129.372.199

Sumber: Data diolah oleh Penulis (2022)

Gambar 4.4
Koperasi Pegawai Negeri Bina Marga Makassar
Laporan Neraca Saldo

LAPORAN NERACA SALDO		
PERIODE JANUARI - DESEMBER 2021		
Nama Akun	Debet	Kredit
Aktiva Lancar		
Kas Tunai	Rp 159.581.263	
Bank BRI	Rp 1.732.500	
Kas Bon	Rp 5.000.000	
Kas Invest Anggota	Rp 6.867.012	
Pinjaman Anggota	Rp 322.572.000	
Persediaan Barang	Rp 3.400.000	
Perlengkapan Usaha	Rp5.000.000	
Utang		
Utang Usaha		Rp 782.397.624
Utang Jasa Anggota		Rp 3.433.506
Simpanan Sukarela		Rp 25.216.746
Modal		
Simpanan Pokok		Rp 500.000
Simpanan Wajib		Rp 128.872.199
Modal Awal		Rp 1.732.500
Pendapatan		
Pembayaran Angsuran		Rp 317.888.200
Pendapatan Lainnya		Rp 750.000
Beban		
Beban Gaji Karyawan	Rp 48.000.000	
Biaya Listrik dan Air	Rp 3.000.000	
Biaya Transportasi	Rp 250.000	

Biaya Website	Rp 538.000	
Biaya Lainnya	Rp 850.000	
JUMLAH	Rp 556.790.775	Rp 556.790.775

Sumber: Data diolah oleh Penulis (2022)



4.2.2 Laporan Keuangan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Bina Marga Makassar berdasarkan SAK ETAP

Bentuk laporan keuangan periode 2021 KPN Bina Marga Makassar berdasarkan SAK ETAP 2016 dapat dilihat berikut ini:

1. Laporan Laba Rugi

Perhitungan hasil usaha adalah laporan yang menggambarkan hasil usaha koperasi dalam satu periode akuntansi. Penyajian akhir dari perhitungan hasil usaha disebut Sisa Hasil Usaha (SHU). SHU tidak hanya mengukur besaran laba tetapi juga menggambarkan manfaat lain bagi anggota. Namun dalam ketentuan baru SAK ETAP, perhitungan hasil usaha berubah menjadi laporan laba rugi. Dalam SAK ETAP (2016), laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos yang terdiri dari pendapatan, beban operasional, beban pajak, laba atau rugi neto.

Gambar 4.5
Koperasi Pegawai Negeri Bina Marga Makassar
Laporan Laba Rugi

LAPORAN LABA RUGI		
PERIODE JANUARI - DESEMBER 2021		
Pendapatan/Penjualan Usaha		
Pendapatan Pinjaman	Rp62.073.200	
Pendapatan Biaya Administrasi	Rp20.000.000	
Pendapatan Biaya Bunga	Rp41.645.800	
Pendapatan Lainnya	<u>Rp750.000</u>	
Total Pendapatan Usaha		Rp124.469.000
Laba Kotor		Rp124.469.000
Beban Operasional		
Beban Gaji Karyawan	Rp48.000.000	
Beban Listrik dan Air	Rp3.000.000	
Beban Transportasi	Rp250.000	

Beban Website	Rp538.000	
Beban Lainnya	<u>Rp850.000</u>	
Total Beban Operasional		<u>Rp52.638.000</u>
Laba bersih sebelum pajak		<u>Rp71.831.000</u>
Beban pajak (5%)		<u>Rp 3.591.550</u>
Laba bersih setelah pajak		<u>Rp 68.239.450</u>

Sumber: Data diolah oleh Penulis (2022)

2. Laporan Perubahan Ekuitas

Komponen-komponen laporan perubahan ekuitas akan menunjukkan perubahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, hibah, dana cadangan, sisa hasil usaha yang tidak dibagikan pada periode akuntansi. Informasi yang disajikan di laporan perubahan ekuitas diantaranya:

- 1) Sisa hasil usaha untuk periode;
- 2) Pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas;
- 3) Pengaruh perubahan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui, sesuai kebijakan akuntansi, estimasi, dan kesalahan untuk setiap komponen ekuitas.
- 4) Rekonsiliasi antara jumlah yang tercatat pada awal dan akhir periode untuk setiap komponen ekuitas, yang menunjukkan perubahan secara terpisah dari:
 - a. Sisa hasil usaha
 - b. Pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas
 - c. Jumlah SHU yang dibagikan dan distribusi lain untuk anggota, yang menunjukkan secara terpisah komponen simpanan anggota.

Gambar 4.6
Koperasi Pegawai Negeri Bina Marga Makassar
Laporan Perubahan Ekuitas

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS							
PERIODE JANUARI - DESEMBER 2021							
Keterangan	Modal Awal	Simpanan Pokok	Simpanan Wajib	Cadangan	Distribusi Lain Untuk Anggota	Beban yang diakui langsung oleh ekuitas	Total
Saldo Awal 1 Januari 2021	Rp1.732.500	Rp500.000	Rp149.804.527				Rp152.037.027
SHU Periode Berjalan				Rp3.870.376	Rp3.870.376	Rp1.935.188	Rp9.675.940
Penambahan/ Pengurangan			-Rp20.932.328				-Rp20.932.328
Modal Akhir 31 Desember 2021	Rp1.732.500	Rp500.000	Rp128.872.199	Rp3.870.376	Rp3.870.376	Rp1.935.188	Rp140.780.639

Sumber: Data diolah oleh Penulis (2022)

3. Neraca

Dalam SAK ETAP, laporan posisi keuangan terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas pada periode tertentu (IAI, 2016). Neraca minimal mencakup pos-pos keuangan berikut ini:

- 1) Kas dan setara kas
- 2) Piutang usaha dan piutang lainnya
- 3) Persediaan
- 4) Properti investasi
- 5) Aset tetap
- 6) Aset tidak berwujud
- 7) Utang usaha dan utang lainnya
- 8) Aset dan kewajiban pajak
- 9) Kewajiban diestimasi
- 10) Ekuitas



UNIVERSITAS FAJAR

Gambar 4.7
Koperasi Pegawai Negeri Bina Marga Makassar
Neraca

NERACA					
PERIODE JANUARI - DESEMBER 2021					
AKTIVA			PASIVA		
Aset Lancar			Utang		
Kas dan Setara Kas	Rp925.145.203		Utang Lancar		
Kas Bank	Rp1.732.500		Simpanan Sukarela	Rp25.216.746	
Kas Invest Anggota	Rp6.867.012		Simpanan Jasa Anggota	Rp3.433.506	
Piutang Pinjaman Anggota	Rp 327.572.000		Utang Usaha	Rp782.397.624	
Persediaan	Rp3.400.000		Pendapatan diterima dimuka	Rp317.888.200	
Perlengkapan	Rp5.000.000				
Jumlah Aset Lancar		Rp 1.269.716.715	Jumlah Utang		Rp1.128.936.076
			Ekuitas		
			Simpanan Pokok	Rp500.000	
			Simpanan Wajib	Rp128.872.199	
			Modal Akhir	Rp1.732.500	
			Dana Cadangan	Rp3.870.376	
			Jasa Anggota	Rp3.870.376	

4. Laporan Arus Kas

Dalam SAK ETAP dikemukakan bahwa laporan arus kas memberikan informasi tentang perubahan uang tunai dan setara tunai dalam suatu entitas untuk periode yang dilaporkan dalam komponen yang terpisah terdiri dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan.

Gambar 4.8
Koperasi Pegawai Negeri Bina Marga Makassar
Laporan Arus Kas

LAPORAN ARUS KAS			
PERIODE JANUARI - DESEMBER 2021			
Rekening Perkiraan	Aktivitas Operasi	Aktivitas Investasi	Aktivitas Pendanaan
AKUN AKTIVA			
Kas dan Setara Kas	Rp925.145.203		
Kas Bank BRI	Rp1.732.500		
Kas Invest Anggota	Rp 6.867.012		
Piutang Pinjaman Anggota	Rp327.572.000		
Persediaan	Rp3.400.000		
Perlengkapan	Rp5.000.000		
AKUN PASIVA			
Simpanan Sukarela			Rp 25.216.746
Simpanan Jasa Anggota			Rp3.433.506
Utang Usaha	Rp 782.397.624		
Pendapatan diterima dimuka	Rp317.888.200		
Simpanan Pokok			Rp500.000
Simpanan Wajib			Rp128.872.199
Dana Cadangan	Rp 3.870.376		
Jasa Anggota	Rp3.870.376		
Dana Pengurus	Rp483.797		
Dana Karyawan	Rp483.797		

Dana Pendidikan	Rp483.797		
Dana Sosial	Rp483.797		
JUMLAH	Rp2.379.678.479		Rp158.022.445

Sumber: Data diolah oleh Penulis (2022)

5. Catatan Atas Laporan Keuangan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Bina Marga Makassar berdasarkan SAK ETAP

Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. Perlakuan akuntansi yang harus diinformasikan antara lain:

1) Gambaran umum koperasi

Sejak tahun 2017 KPN Bina Marga mulai memisahkan diri dan berdiri sendiri dibawah naungan Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Makassar karena telah memiliki cukup pegawai untuk mengurus dan mengelola koperasi ini. Koperasi ini bergerak dibidang simpan pinjam dan pelayanan dibidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan non anggota yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para pegawai negeri selaku anggota dan non anggota koperasi. Koperasi yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan KM. 17, Pai, Biringkanaya, Kota Makassar ini telah beranggotakan 75 orang.

- 2) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan KPN Bina Marga Makassar adalah menggunakan *accrual basis* (basis akrual) dalam pencatatan transaksinya.
- 3) Catatan atas laporan keuangan koperasi perlu jelas dan nyata, memuat informasi yang lain, diantaranya:
 - a. Kegiatan usaha utama dari Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Bina Marga Makassar adalah pelayanan simpan pinjam kepada anggota maupun non anggota koperasi.
 - b. Kegiatan pelayanan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Bina Marga Makassar kepada anggota berupa pelayanan simpan pinjam dan pelayanan kebutuhan persediaan anggota apabila barang tersedia di gudang koperasi.
- 4) Sisa Hasil Usaha yang dibagikan tiap tahun dialokasikan sebagai berikut:
 - a. Dana Cadangan 40%
 - b. Jasa Anggota 40% yang dialokasikan menjadi:
 - a) Jasa Usaha 60%
 - b) Jasa Modal 40%
 - c. Dana Pengurus 5%
 - d. Dana Karyawan 5%
 - e. Dana Pendidikan 5%
 - f. Dana Sosial 5%

4.3 Pembahasan

4.3.1 Analisis Penerapan SAK ETAP dalam Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Bina Marga Makassar

1. Laporan Laba Rugi

Berdasarkan wawancara dan pengamatan penulis, laporan laba rugi yang disusun oleh Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Bina Marga Makassar dibuat dalam bentuk *single step*, yang mana pendapatan tidak dibedakan menjadi pendapatan usaha atau pendapatan diluar usaha, seluruh pendapatan yang menambah penghasilan koperasi diakui sebagai pendapatan. Dalam laporan ini, terdapat pula estimasi data pinjaman atau tagihan yang terdiri dari jumlah pinjaman, pendapatan biaya administrasi, dan pendapatan biaya bunga. Hal ini tidak sesuai dengan teori SAK ETAP 2016 karena didalam laporan laba rugi menurut SAK ETAP 2016 tidak dicantumkan rekening pinjaman anggota dan non anggota. Rekening pinjaman merupakan kelompok rekening piutang yang seharusnya dimasukkan kedalam laporan neraca. Lalu, untuk menjalankan kegiatan operasionalnya, koperasi mengeluarkan beban-beban berupa beban gaji karyawan, biaya listrik dan air, biaya transportasi, biaya *website*, dan biaya lainnya. Namun, dalam kelompok beban ini tidak dicantumkan beban atas pajak sebesar 5%nya. Beban pajak dicantumkan di Laporan Pembagian Sisa Hasil Usaha.

2. Laporan Perubahan Ekuitas

Berdasarkan wawancara dan pengamatan, laporan perubahan ekuitas tidak dibuat oleh KPN Bina Marga Makassar. Sebagai laporan pengganti, koperasi ini menyusun Laporan Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU). Dalam laporan ini, beban pajak sebesar 5% dicantumkan yang seharusnya dilaporkan di laporan laba rugi sehingga SHU yang tertera dalam laporan perubahan ekuitas adalah sisa hasil usaha setelah pajak. Laporan ini mengalokasikan pembagian SHU kepada anggota dan dijadikan sebagai dana untuk digunakan membiayai pengeluaran-pengeluaran yang langsung berkaitan dengan ekuitas seperti, dana cadangan, jasa anggota, dana

pengurus, dana karyawan, dana pendidikan, dan dana sosial. Laporan ini tidak sesuai dengan teori SAK ETAP 2016 karena dalam hasil pengamatan, mereka tidak melaporkan jumlah SHU yang dibagikan dan pos keuangan lain untuk anggota, yang mengungkapkan secara terpisah komponen simpanan anggota seperti simpanan pokok dan simpanan wajib padahal menurut teori SAK ETAP seharusnya dilaporkan jumlah SHU yang dibagikan dan yang tidak dibagikan agar lebih transparan.

3. Neraca

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara, laporan neraca yang disusun oleh KPN Bina Marga Makassar adalah laporan neraca saldo. Hal ini tidak sesuai dengan teori SAK ETAP 2016 karena laporan yang seharusnya adalah neraca. Penyajian laporan neraca saldo oleh koperasi ini terlihat berbeda dengan ketentuan SAK ETAP, diantaranya dalam kelompok Aktiva, merincikan rekening kas bank seperti Bank BKE, Bank BNI, Bank BRI, yang pada format SAK ETAP digabung menjadi Kas Bank. Selain itu, di dalam laporan yang dibuat terdapat rekening Kas Bon yakni fasilitas yang diberikan oleh koperasi untuk anggota berupa pinjaman. Dalam teori SAK ETAP, rekening ini merupakan kelompok piutang pinjaman anggota. Adapun rekening yang tidak terdapat dalam laporan ini adalah investasi jangka panjang, properti investasi, aset tetap dan aset tak berwujud serta akumulasi penyusutannya. Adapun dalam kelompok pasiva, tidak terdapat simpanan berjangka, aset dan kewajiban pajak, kewajiban diestimasi, hutang lancar lainnya, hutang jangka panjang. Dalam laporan neraca saldonya, juga terdapat rekening pendapatan yang terdiri dari pembayaran angsuran, dan pendapatan lainnya, dan beban terdiri dari seluruh beban yang seharusnya dilaporkan dalam Laporan Laba Rugi. Berdasarkan teori SAK ETAP 2016, pembayaran angsuran masuk dalam kelompok pendapatan yang diterima

dimuka karena termasuk pendapatan yang telah terjadi akibat pinjaman yang dilakukan oleh anggota dan non anggota koperasi. Kelompok ekuitas juga merincikan rekening-rekening yang berkaitan langsung dengan ekuitas seperti jasa anggota, dana pengurus, dana karyawan, dana pendidikan, dan dana sosial yang mana rekening ini tidak dilaporkan dalam neraca saldo KPN Bina Marga Makassar.

4. Laporan Arus Kas

Berdasarkan wawancara penulis dengan pengurus koperasi, tidak terdapat laporan arus kas yang disusun oleh pengurus Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Bina Marga Makassar sedangkan menurut teori SAK ETAP 2016 laporan arus kas adalah salah satu komponen laporan keuangan yang harus dilaporkan.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Berdasarkan wawancara penulis dengan pengurus koperasi, juga tidak terdapat catatan atas laporan keuangan yang disusun oleh pengurus Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Bina Marga Makassar sedangkan menurut teori SAK ETAP 2016 laporan arus kas adalah salah satu komponen laporan keuangan yang harus dilaporkan.

4.3.2 Perbandingan Bentuk Penyusunan Laporan KPN Bina Marga Makassar dengan SAK ETAP.

Tabel 4.1 Perbandingan Bentuk Laporan Keuangan

No.	Laporan Keuangan Menurut KPN Bina Marga Makassar	Laporan Keuangan Menurut SAK ETAP	Keterangan
1	Laporan Laba Rugi	Laporan Laba Rugi	Belum Sesuai
2	Laporan Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU)	Laporan Perubahan Ekuitas	Belum Sesuai
3	Laporan Neraca Saldo	Laporan Neraca	Belum Sesuai
4	Tidak ada	Laporan Arus Kas	Belum Sesuai
5	Tidak ada	Catatan Atas Laporan	Belum Sesuai

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan SAK ETAP pada penyajian laporan keuangan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Bina Marga Makassar, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Laporan keuangan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Bina Marga Makassar belum menerapkan standar akuntansi SAK ETAP sebab terdapat pos-pos keuangan yang belum sesuai dengan ketentuan yang diatur.
2. Laporan keuangan yang disusun oleh Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Bina Marga Makassar berupa laporan laba rugi, laporan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU), dan laporan neraca saldo. Adapun laporan keuangan yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) adalah laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

5.2 Saran

1. Bagi Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Bina Marga Makassar

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dilakukan pada laporan keuangan KPN Bina Marga Makassar terdapat beberapa saran yang dapat diberikan, antara lain:

- a. Penyusunan laporan keuangan KPN Bina Marga Makassar seharusnya disusun sesuai dengan standar akuntansi koperasi terkini yakni SAK ETAP (2016).

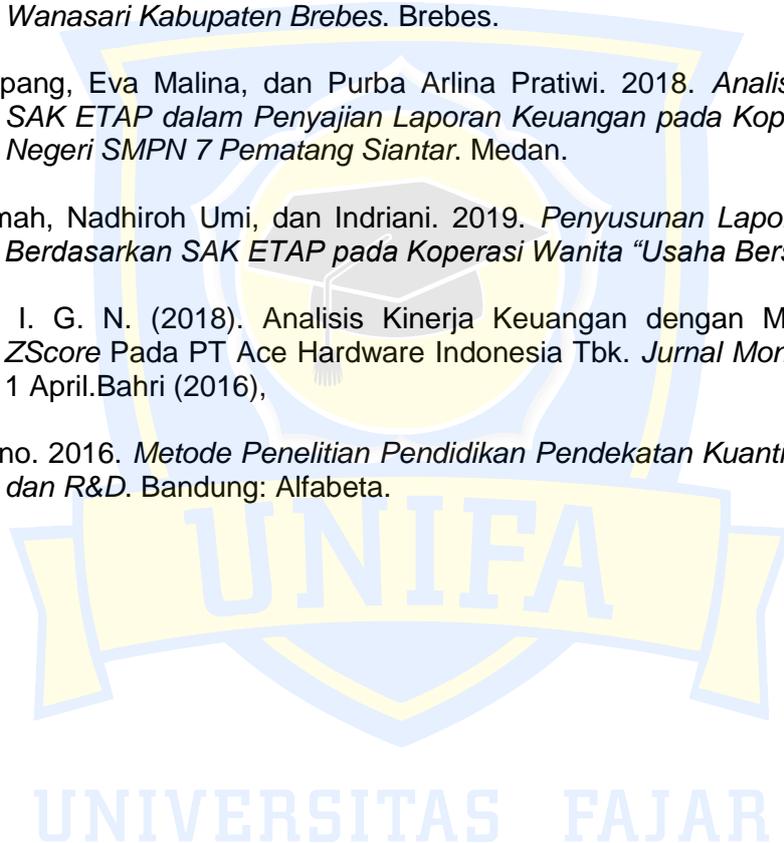
- b. Laporan keuangan yang disusun sesuai dengan SAK ETAP terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.
 - c. Disarankan untuk KPN Bina Marga Makassar dalam penyusunan laporan keuangan selanjutnya sudah sesuai dengan SAK ETAP terbaru.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Adapun saran-saran yang dapat diberikan kepada peneliti selanjutnya dengan penelitian yang sama agar memperoleh hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut:

- a. Penelitian selanjutnya yang dimaksudkan untuk meneliti penerapan SAK ETAP dalam penyusunan laporan keuangan diharapkan dapat melakukan penelitian pada koperasi lainnya yang memiliki bidang usaha yang sama yakni simpan pinjam sehingga penerapan standar akuntansi yang baik dan benar dapat dipastikan diterapkan oleh seluruh koperasi di Indonesia.
- b. Peneliti dapat merekonstruksi sistem akuntansi, kebijakan akuntansi, pengakuan, pengukuran, dan penyajian laporan keuangan agar lebih lengkap dan lebih memberikan hasil yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Kusrini, Henny. 2020. *Analisis Penerapan SAK ETAP pada Laporan Keuangan BUMDES Kamboja Desa Cinta Raja*. Medan.
- Kasmir. 2017. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Nurdiansyah Hadi, dan Setiawan, Hendra. 2016. *Analisis Penerapan SAK ETAP dalam Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi (Studi Kasus pada KOPKAR PDAM Tirta Sanita)*. Bogor.
- Putri, Ludwi Jayanti Jamil. 2021. *Analisis Penerapan SAK ETAP dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada Koperasi Unit Desa (KUD) Wanasari Kabupaten Brebes*. Brebes.
- Simatupang, Eva Malina, dan Purba Arlina Pratiwi. 2018. *Analisis Penerapan SAK ETAP dalam Penyajian Laporan Keuangan pada Koperasi Pegawai Negeri SMPN 7 Pematang Siantar*. Medan.
- Srikalimah, Nadhiroh Umi, dan Indriani. 2019. *Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP pada Koperasi Wanita "Usaha Bersama"*. Kediri.
- Suteja, I. G. N. (2018). Analisis Kinerja Keuangan dengan Metode *Altman ZScore* Pada PT Ace Hardware Indonesia Tbk. *Jurnal Moneter* vol. v no. 1 April. Bahri (2016),
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.



DAFTAR LAMPIRAN

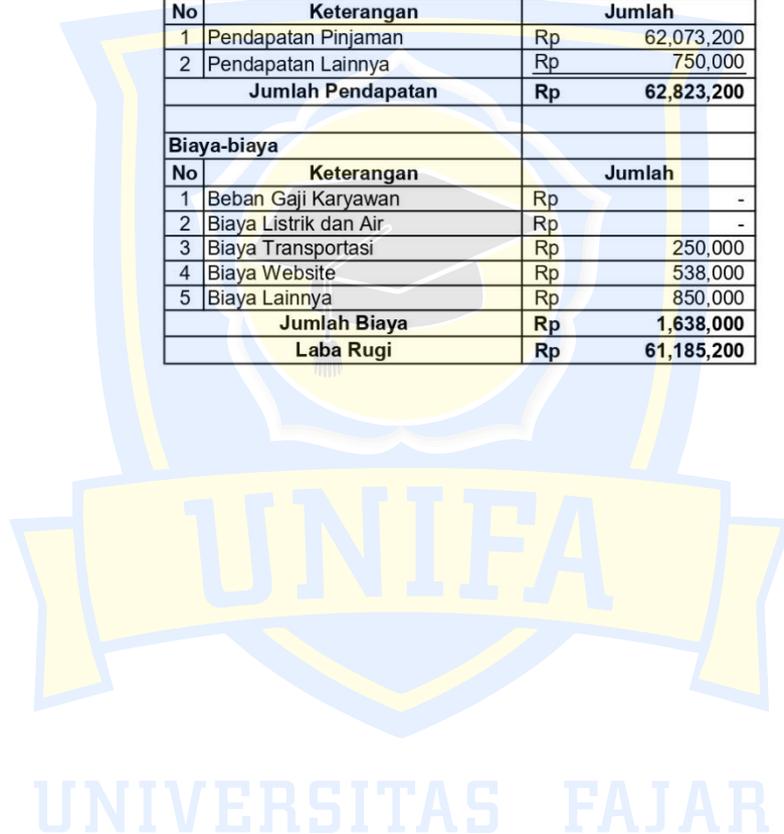
1. Surat Permohonan Izin Penelitian

 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL				
Nomor : 205/B/DFEIS-UNIFA/II/2022				
Lamp. : -				
Hal : PERMOHONAN IZIN PENELITIAN				
Kepada Yth.				
Koperasi Pegawai Negeri (Kpn) Bina Marga Makassar (Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 17, Pai, Biringkanaya, Kota Makassar)				
Di- Tempat				
Dengan hormat,				
Disampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi & Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Fajar Makassar yang tersebut namanya dibawah ini bermaksud mengadakan Penelitian pada perusahaan yang Bapak/Ibu Pimpin serangkaian dengan pembuatan Skripsi yang diprogramkan pada semester Ganjil Tahun Akademik 2021-2022. Adapun penelitian yang dimaksud untuk memperoleh data-data pendukung sekaitan dengan judul Skripsi yang akan ditulis.				
Sehubungan dengan maksud tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan memberikan izin/kesempatan kepada mahasiswa :				
No	Stambuk	Nama	Jenjang	Prodi/Konsentrasi
1	2010323015	Nur Annisa	Strata Satu (S1)	Akuntansi/-
Judul Tugas Akhir : "ANALISIS PENERAPAN SAK ETAP 2011 DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA KOPERASI PEGAWAI NEGERI (KPN) BINA MARGA MAKASSAR."				
Data Yang Dibutuhkan :				
1. Data Laporan Keuangan Koperasi Periode 2021				
Demikian permohonan kami, atas bantuan dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.				
Makassar, 25 February 2022				
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial, Dekan,				
 Dr. Yusmanizar, S.Sos., M.I.Kom NIDN : 0925096902				
Tembusan Kepada Yth :				
- Ketua Prodi Akuntansi - Peringgal - Kontak Person : (085240935973)				
<small>Jl. Prof. Abdurrahman Basalamah No. 101, Makassar. Nomor telepon : (0411) 447508-459938 fax. (0411) 441119, Email : info@unifa.ac.id Makassar 90231</small>				

Lampiran 1 Surat Permohonan Izin Penelitian

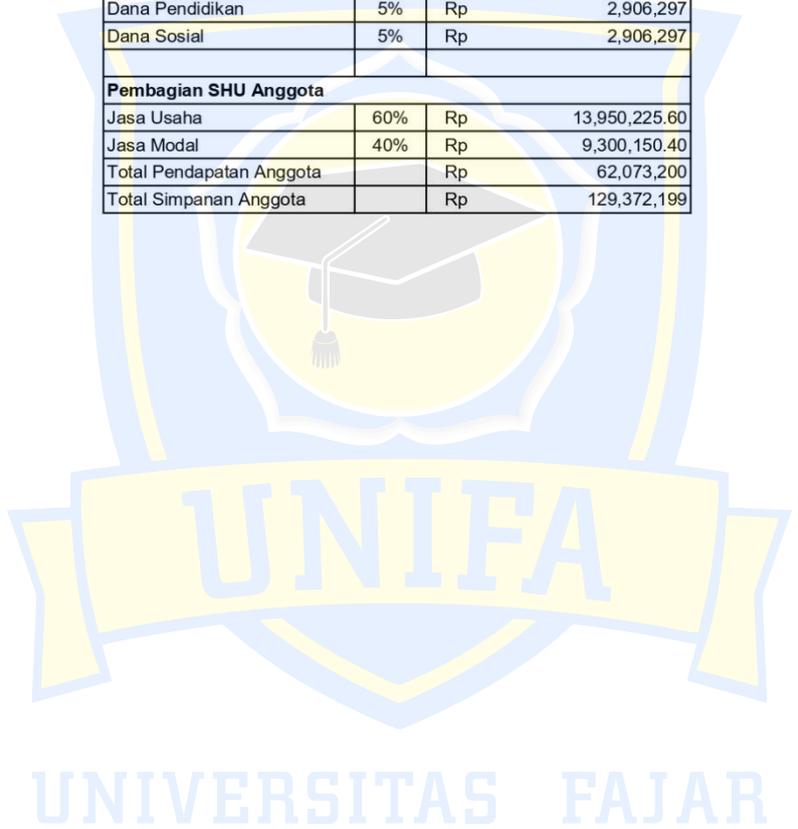
2. Laporan Laba Rugi KPN Bina Marga Makassar

KPN BINA MARGA		
LAPORAN LABA RUGI		
Untuk periode 01 Januari - 31 Desember 2021		
Estimasi Data Pinjaman		
No	Keterangan	Jumlah
1	Jumlah Pinjaman	Rp 322,572,000
2	Pendapatan Biaya Administrasi	Rp -
3	Pendapatan Biaya Bunga	Rp 41,645,800
Jumlah Tagihan		Rp 364,217,800
Estimasi Pendapatan Pinjaman		Rp 41,645,508
Pendapatan		
No	Keterangan	Jumlah
1	Pendapatan Pinjaman	Rp 62,073,200
2	Pendapatan Lainnya	Rp 750,000
Jumlah Pendapatan		Rp 62,823,200
Biaya-biaya		
No	Keterangan	Jumlah
1	Beban Gaji Karyawan	Rp -
2	Biaya Listrik dan Air	Rp -
3	Biaya Transportasi	Rp 250,000
4	Biaya Website	Rp 538,000
5	Biaya Lainnya	Rp 850,000
Jumlah Biaya		Rp 1,638,000
Laba Rugi		Rp 61,185,200



3. Laporan Pembagian Sisa Hasil Usaha KPN Bina Marga Makassar

KPN BINA MARGA			
LAPORAN PEMBAGIAN SHU			
Untuk periode 01 Januari - 31 Desember 2021			
SHU Sebelum Pajak		Rp	61,185,200
Pajak PPh (5%)		Rp	3,059,260
SHU Setelah Pajak		Rp	58,125,940
Pembagian SHU untuk Dana-dana			
Dana Cadangan	40%	Rp	23,250,376
Jasa Anggota	40%	Rp	23,250,376
Dana Pengurus	5%	Rp	2,906,297
Dana Karyawan	5%	Rp	2,906,297
Dana Pendidikan	5%	Rp	2,906,297
Dana Sosial	5%	Rp	2,906,297
Pembagian SHU Anggota			
Jasa Usaha	60%	Rp	13,950,225.60
Jasa Modal	40%	Rp	9,300,150.40
Total Pendapatan Anggota		Rp	62,073,200
Total Simpanan Anggota		Rp	129,372,199



UNIFA
UNIVERSITAS FAJAR

Lampiran 3 Laporan Pembagian SHU 2021 KPN Bina Marga Makassar

4. Laporan Neraca Saldo KPN Bina Marga Makassar

KPN BINA MARGA		
LAPORAN NERACA SALDO		
Untuk periode 01 Januari - 31 Desember 2021		
Nama Akun	Debet	Kredit
Aktiva Lancar		
Kas Tunai	Rp 159,581,263	Rp -
Bank BKE	Rp -	Rp -
Bank BNI	Rp -	Rp -
Bank BRI	Rp 1,732,500	Rp -
Kas Bon	Rp 5,000,000	Rp -
Kas Inves Anggota	Rp 6,867,012	Rp -
Piutang Usaha	Rp -	Rp -
Pinjaman Anggota	Rp 322,572,000	Rp -
Persediaan Barang	Rp 3,400,000	Rp -
Biaya Dibayar Dimuka	Rp -	Rp -
Perlengkapan Usaha	Rp -	Rp -
Pemisalan	Rp -	Rp -
Aktiva Tetap Berwujud	Rp -	Rp -
Peralatan Kantor	Rp -	Rp -
Inventaris Kendaraan	Rp -	Rp -
Mesin	Rp -	Rp -
Aktiva Tetap Lainnya	Rp -	Rp -
Utang		Rp -
Utang Usaha	Rp -	Rp 22,397,624
Utang Jasa Anggota	Rp -	Rp 3,433,506
Simpanan Sukarela	Rp -	Rp 25,216,746
Utang Pajak	Rp -	Rp -
Utang Jangka Panjang		Rp -
Utang Bank	Rp -	Rp -
Modal		Rp -
Simpanan Pokok	Rp -	Rp 500,000
Simpanan Wajib	Rp -	Rp 128,872,199
Modal Awal	Rp -	Rp 1,732,500
Modal Sumbangan	Rp -	Rp -
Modal Cadangan	Rp -	Rp -
Pendapatan	Rp -	Rp -
Pembayaran Angsuran	Rp -	Rp 317,888,200
Pendapatan Lainnya	Rp -	Rp 750,000
Beban	Rp -	Rp -
Beban Gaji Karyawan	Rp -	Rp -
Biaya Listrik dan Air	Rp -	Rp -
Biaya Transportasi	Rp 250,000	Rp -
Biaya Website	Rp 538,000	Rp -
Biaya Lainnya	Rp 850,000	Rp -
JUMLAH	Rp 500,790,775	Rp 500,790,775

Lampiran 4 Laporan Neraca Saldo 2021 KPN Bina Marga Makassar